

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta. 2018

Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Jawa Timur. 2018

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006.

Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan negara*, PT. Gramedia, Jakarta. 1986

Bagir Manan, *Demokratisasi Partai Politik*, dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-3, Padang. 2016

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.

Barda Nawawi Arief, *Penelitian Hukum normative*, Purwokerto: Penataran Metodologi Penelitian Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1995.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Didik Supriyanto, Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Yayasan Perludem, Jakarta. 2012

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta. 2007

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009

Meny, Yves and Knapp. *Government and Politics in Western Europe: Britain, Italy, Germany*. 3rd edition, Oxford University Press. 1998

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2009

Muhadam Labolo & Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada MG 2010

Ramlan Surbakti, *Peta Permasalahan dalam Keuangan Politik Indonesia, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta. 2015

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 19912

Sidik Pramono, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Jakarta. 2013

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-13, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD NRI 1945*, Jakarta: Rajawali Pers. 2008

Veri Junaidi et.al., *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Cetakan I, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta. 2011

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta. 2006

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan

Karya;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan



Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penyelenggaraan Dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

C. Makalah dan Jurnal

Jimly Asshiddiqie. 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Serpihan Hukum, Media, dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta.

Perludem, Kopel, Yayasan Kauci, Kemitraan Untuk Integritas Dan Tata Pembaruan Pemerintahan. 2011, *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek*, Jakarta.

D. Internet

International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Diakses dari <http://perludem.org/> Pada Sabtu 13 November 2022.